

IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN (UDKP)

(Studi Kasus Tentang Pelaksanaan UDKP, di Kecamatan Gedangan
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo)

SKRIPSI

KK

715 P 131 1998

HER

2



Disusun oleh :

NINUK HERLINA

NIM. 079314062

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Semester Genap 1997/1998

IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN (UDKP)

**(Studi Kasus Tentang Pelaksanaan UDKP, di Kecamatan Gedangan
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dengan Program Studi Ilmu Politik**

R A L A T

**Baris pertama pada judul tertulis:
IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN
seharusnya:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

Diajukan oleh :

NINUK HERLINA

NIM. 079314062

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Semester Genap 1997/1998

ABSTRAK

Masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana implementasi atau pelaksanaan dari kebijakan UDKP yang berjalan di daerah penelitian, dua, hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam implementasi kebijakan UDKP, tiga, siapa yang diuntungkan dan siapa dirugikan dengan diberlakukannya kebijakan UDKP?

Tujuan penelitian ini, disamping untuk mencari jawaban terhadap masalah yang diajukan, data yang didapat juga akan berguna bagi pemahaman kita tentang realitas yang ada berkaitan dengan upaya pemerintah melalui kebijakan UDKP untuk turut menggalakkan, membina dan meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat bagi pembangunan daerahnya.

Lokasi dari penelitian ini yaitu di wilayah Kecamatan Gedangan yang terletak di Kabupaten/Daerah Tingkat II Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan tipe penelitian adalah studi kasus, unit analisis yang dipilih adalah lembaga, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi partisipan serta ditunjang dengan arsip-arsip, sedangkan teknik analisa data dilakukan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian ini, secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan UDKP yang ada di Kecamatan Gedangan tidak berjalan secara efektif, sehingga dapat dikatakan kurang berhasil. Hal ini terlihat bahwa UDKP sebagai pengelola keterpaduan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang memiliki kewajiban untuk melakukan tugas pendataan, penyusunan pola pengembangan wilayah kecamatan yang ditujukan sebagai pedoman untuk merencanakan, juga koordinasi, pemantauan, evaluasi serta tindak lanjut kegiatan pembangunan secara terpadu dapat dilaksanakan secara menyeluruh, hanya sampai pada tingkat perencanaan proyek/kegiatan pembangunan. Pihak pelaksana yang cenderung melakukan kegiatan yang bersifat administratif, serta minimnya proyek/kegiatan pembangunan yang memperoleh persetujuan dari kabupaten yang didalamnya terkandung pula proyek/kegiatan pembangunan yang tidak mencerminkan aspirasi desa bahkan terkadang kurang perlu untuk dilakukan. Kurangnya koordinasi serta desa dalam posisi kurang berdaya apabila telah berhadapan dengan pemerintah yang ada di atasnya juga menjadi penghalang bagi pelaksanaan kebijakan UDKP. Kebijakan UDKP pada intinya lebih memberi keuntungan bagi pihak kecamatan dimana UDKP terdapat, pekerjaan pihak kecamatan dipermudah oleh sikap desa yang cenderung kurang memiliki kekuasaan untuk melawan, begitu pula pada pemerintah kabupaten yang memiliki wewenang untuk menentukan setiap proyek/kegiatan pembangunan yang akan direalisasi cenderung berpeluang baginya untuk berkolusi. Desa yang berposisi sebagai pihak yang dirugikan, karena limpahan tugas dari pemerintah di atasnya selalu berakhir dan menjadi beban desa, begitu pula dalam masalah pembangunan, tugas desa adalah dimulai dari perencanaan proyek/kegiatan pembangunan hingga sampai pada akhir tujuan dari proyek/kegiatan itu sendiri. Saran yang bisa diberikan dari pelaksanaan kebijakan UDKP adalah bertitik tolak dari penyebab tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan UDKP itu sendiri serta hambatan yang ada.